

## Penguatan Peran Guru dalam Reformasi Manajemen Kurikulum di MA Darussalam: Solusi Berbasis Kepemimpinan

Muh. Imam Khaudli<sup>1\*</sup>, Fitdarus Kussuma<sup>2</sup>

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi

[ImamKhaudli13@gmail.com](mailto:ImamKhaudli13@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [daruslkurniawan@gmail.com](mailto:daruslkurniawan@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [ImamKhaudli13@gmail.com](mailto:ImamKhaudli13@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This study highlights the importance of strengthening the role of teachers in curriculum management reform through a transformational leadership approach at MA Darussalam. The aim of the research is to conduct an in-depth analysis of strategies for empowering teachers within the context of curriculum reform, enabling them to become not only implementers but also designers and drivers of instructional change. A qualitative approach was employed, using a case study method to contextually understand the dynamics of leadership and teacher participation in curriculum management. Data collection techniques included in-depth interviews, participatory observation, and documentation, with purposive sampling of informants consisting of the school principal, the vice principal of curriculum affairs, and teachers from various subject areas. Data analysis was conducted thematically to identify patterns of roles, collaboration, and the influence of leadership on enhancing teacher participation. The findings reveal that participatory transformational leadership encourages active teacher involvement in curriculum development, enhances professional motivation, and fosters a learning ecosystem that is more adaptive and responsive to the socio-religious context of the madrasah. The study recommends the implementation of a leadership model based on collaboration and reflection as a sustainable and relevant strategy for curriculum reform in pesantren based madrasahs.*

**Keywords:** *Strengthening the role of teachers, Curriculum Management Reform, Leadership.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan peran guru dalam reformasi manajemen kurikulum melalui pendekatan kepemimpinan transformasional di MA Darussalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi pemberdayaan guru dalam konteks reformasi kurikulum agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga perancang dan penggerak perubahan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara kontekstual dinamika kepemimpinan dan partisipasi guru dalam manajemen kurikulum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan secara purposive sampling yang terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, serta guru dari berbagai mata pelajaran. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola peran, kolaborasi, serta pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan partisipasi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif guru dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan motivasi profesional, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks sosial-keagamaan madrasah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model kepemimpinan berbasis kolaborasi dan refleksi sebagai strategi reformasi kurikulum yang berkelanjutan dan relevan di madrasah berbasis pesantren.

**Kata Kunci:** Penguatan peran guru, Reformasi Manajemen kurikulum, Kepemimpinan.

### 1. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika perubahan kebijakan pendidikan nasional, guru di tingkat madrasah aliyah dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang berdampak langsung terhadap efektivitas manajemen kurikulum. Implementasi Kurikulum Merdeka yang mendorong kemandirian sekolah dalam menyusun perangkat ajar sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas guru sebagai aktor utama dalam pengelolaan kurikulum. (Maisyaroh et al., 2024; Muslimah & Sukartono, 2025; Sholeh, 2022) Banyak guru masih diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai perancang strategis pembelajaran, sehingga reformasi kurikulum hanya berlangsung secara

administratif, bukan substantif. Fakta ini menimbulkan ketimpangan antara desain kurikulum yang ideal di atas kertas dan praktik pembelajaran di ruang kelas. Ketergantungan terhadap keputusan pimpinan sekolah dan lemahnya keterlibatan guru dalam forum perencanaan kurikulum menjadi gambaran sosial yang nyata, di mana kepemimpinan partisipatif belum menjadi budaya dalam manajemen pendidikan madrasah.

Di sisi lain, berbagai perubahan sosial, seperti masuknya pengaruh digitalisasi, pergeseran nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, serta tekanan globalisasi, menuntut kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif. (Withorn et al., 2021), Dalam situasi ini, penguatan peran guru tidak hanya relevan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Guru bukan lagi sekadar penyampai materi, tetapi dituntut untuk berperan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader), perancang kurikulum mikro, serta fasilitator nilai-nilai karakter dan keagamaan. (Altamirano, 2022; Rademaker, 2022) Namun sayangnya, belum banyak madrasah yang mengembangkan sistem pelatihan dan pemberdayaan berkelanjutan bagi guru dalam hal kepemimpinan kurikulum. Oleh karena itu, fakta sosial yang muncul dari lapangan menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam manajemen kurikulum. Solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa regulasi top-down, tetapi harus berbasis pada kepemimpinan transformasional yang menempatkan guru sebagai subjek perubahan. Diperlukan upaya membangun budaya kolektif di mana guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum kontekstual, dan refleksi pembelajaran yang berkelanjutan. Inilah saatnya reformasi kurikulum dibangun dari bawah, dimulai dari ruang kelas dan suara guru.

Penguatan peran guru dalam reformasi manajemen kurikulum di MA Darussalam sejatinya memiliki dasar yang kuat, baik secara spiritual dalam Al-Qur'an maupun secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Kalthoum, n.d.; Mahmud et al., 2024; Syahid, n.d.) Dalam Al-Qur'an, peran guru sebagai pembimbing dan pemimpin pembelajaran tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang menegaskan pentingnya membaca, belajar, dan mengajarkan ilmu: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan... yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam."* Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan dan penyampaian ilmu adalah tugas mulia yang menuntut peran aktif dari guru sebagai agen transformasi. Dalam konteks konstitusional, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah wajib

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini menjadi dasar legal bahwa reformasi kurikulum harus berpihak pada penguatan peran guru, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai perancang dan pengarah pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan guru di MA Darussalam bukan hanya tuntutan kebijakan pendidikan, melainkan bagian dari amanah ilahiah dan konstitusional yang harus diimplementasikan secara serius dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran guru dalam reformasi manajemen kurikulum, khususnya di lingkungan sekolah atau madrasah berbasis keagamaan. (Arar et al., 2022; Tamami et al., 2024; Wahyu, 2022) Penelitian oleh Suryosubroto (2020) mengungkapkan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh struktur kebijakan pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal dan sejauh mana guru diberdayakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks madrasah, penelitian Qomaruddin (2019) menemukan bahwa guru masih cenderung diposisikan sebagai pelaksana, bukan sebagai mitra strategis dalam manajemen kurikulum. Kondisi ini menghambat lahirnya inovasi pembelajaran yang kontekstual dan berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar.

Penelitian dari Susanti & Wahyudi (2021) menekankan bahwa pendekatan *distributed leadership* (kepemimpinan yang didistribusikan) menjadi solusi yang efektif untuk mengoptimalkan peran guru dalam manajemen sekolah. (Darwanto et al., 2024) Dalam studi kasus madrasah aliyah swasta, ditemukan bahwa ketika guru dilibatkan secara aktif dalam penyusunan perangkat kurikulum dan diberikan ruang untuk menyuarakan gagasan, terjadi peningkatan motivasi dan tanggung jawab profesional. Hal ini juga diperkuat oleh studi dari Mustofa (2022) yang menunjukkan bahwa peran guru sebagai agen perubahan sangat bergantung pada sejauh mana pimpinan madrasah menerapkan kepemimpinan transformatif yakni kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan inovasi. (Hulawa et al., 2024) Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membuka wawasan penting, belum banyak studi yang secara khusus menyoroti dinamika tersebut di konteks madrasah aliyah berbasis pesantren, yang memiliki karakteristik sosial-religius dan budaya organisasi tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan pendekatan solusi berbasis kepemimpinan yang mendorong penguatan peran guru

secara nyata, tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penggerak transformasi pembelajaran di lingkungan madrasah.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan (novelty) dalam diskursus reformasi kurikulum di tingkat madrasah, khususnya melalui pendekatan kepemimpinan berbasis pemberdayaan guru. (Mohammad, 2025; Mufarokah et al., 2025; Neliwati et al., 2025) Selama ini, banyak kajian tentang manajemen kurikulum cenderung berfokus pada aspek struktural dan administratif, seperti regulasi pusat, desain kurikulum nasional, atau kebijakan madrasah secara umum. Padahal, aktor kunci dalam implementasi kurikulum adalah guru, yang setiap hari berinteraksi langsung dengan peserta didik, materi ajar, dan konteks lokal. Penelitian ini secara spesifik menyoroti bagaimana peran guru dalam proses reformasi kurikulum dapat ditingkatkan secara strategis melalui kepemimpinan transformatif yang menekankan kolaborasi, partisipasi aktif, dan pemberian ruang bagi inovasi. Dengan menjadikan guru sebagai mitra strategis dalam pengembangan kurikulum, bukan sekadar pelaksana kebijakan, penelitian ini berupaya menata ulang relasi kuasa dalam sistem manajemen kurikulum agar lebih demokratis dan progresif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis secara mendalam strategi penguatan peran guru dalam reformasi manajemen kurikulum melalui pendekatan kepemimpinan transformasional yang partisipatif. (Adeoye et al., 2025; Sliwka et al., 2024) Tujuan ini dilandasi oleh urgensi dan kenyataan bahwa dalam praktiknya, reformasi kurikulum sering kali hanya berjalan secara administratif, tanpa menyentuh esensi perubahan di ruang kelas. Guru, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pembaharuan pembelajaran, justru masih ditempatkan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang dirumuskan secara top-down. Ketidakterlibatan guru dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kurikulum telah menciptakan kesenjangan antara rancangan ideal kurikulum dan realitas pembelajaran yang terjadi di madrasah. Lembaga pendidikan Islam tingkat menengah dengan karakteristik sosial-religius yang khas membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pemberdayaan sumber daya internal khususnya guru.

Oleh karena itu, tujuan ini penting tidak hanya untuk menjawab permasalahan struktural dalam manajemen kurikulum, tetapi juga untuk menghadirkan model kepemimpinan alternatif yang mampu memberdayakan guru sebagai mitra strategis. Kepemimpinan tidak lagi cukup bersifat instruksional atau administratif, melainkan harus bersifat transformasional yang mampu mendorong perubahan budaya organisasi,

meningkatkan motivasi guru, dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif. Penguatan peran guru dalam konteks ini mencakup pelibatan aktif dalam perencanaan kurikulum, pengembangan perangkat ajar, evaluasi pembelajaran, hingga pengambilan kebijakan berbasis refleksi kelas. (Kusmawan et al., 2025; Munna & Kalam, 2021; Zhao et al., 2024) Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan manajemen kurikulum yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkeadilan secara partisipatif. Dengan memahami bagaimana peran guru dapat diperkuat melalui kepemimpinan yang tepat, madrasah dapat membangun sistem pembelajaran yang lebih relevan, responsif, dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses, strategi, dan peran kepemimpinan dalam penguatan posisi guru pada reformasi manajemen kurikulum di MA Darussalam Blokagung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi data secara naturalistik dan kontekstual, sesuai dengan dinamika kehidupan nyata para pelaku pendidikan di madrasah. Studi kasus dipilih karena penelitian ini difokuskan pada satu lokasi spesifik dengan fenomena unik yang sedang berlangsung, yaitu proses perubahan dan penguatan sistem manajemen kurikulum yang melibatkan kepemimpinan kepala madrasah dan kolaborasi aktif guru.

Penelitian ini menekankan pada keterlibatan guru dalam reformasi kurikulum, yang selama ini kerap dianggap sebagai pelaksana pasif, bukan perancang aktif. Oleh karena itu, metode ini bertujuan menggali narasi-narasi yang bersumber langsung dari guru dan pemimpin madrasah, serta mengamati proses manajerial dalam lingkup sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memahami persepsi dan pengalaman informan terhadap reformasi kurikulum dan kepemimpinan madrasah. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah, termasuk dalam forum rapat, supervisi pembelajaran, serta kegiatan penyusunan perangkat kurikulum. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh, seperti dokumen kurikulum, struktur organisasi, notulen rapat, dan kebijakan internal.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan peran dan relevansi informan terhadap isu yang diteliti. Informan utama

meliputi unsur pimpinan, guru, serta pengawas eksternal yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam manajemen kurikulum di MA Darussalam. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, dengan cara mengonfirmasi data antar informan serta mencocokkan antara wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema kunci, pola hubungan antar peran, serta makna di balik tindakan yang dilakukan oleh para informan. Proses analisis dilakukan secara simultan selama dan setelah pengumpulan data. Berikut adalah tabel informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.** Data Informan

No	Jabatan/Peran	Keterangan Tambahan
1	Kepala MA Darussalam	Pengambil kebijakan utama madrasah
2	Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum	Koordinator implementasi kurikulum
3	Guru Bahasa Indonesia	Anggota tim pengembang kurikulum madrasah
4	Guru Pendidikan Agama Islam	Guru senior, pelaksana pembelajaran aktif
5	Guru BK	Mengamati efek perubahan kurikulum terhadap siswa

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penguatan peran guru dalam reformasi kurikulum yang berbasis pada model kepemimpinan partisipatif dan transformatif, serta dapat dijadikan referensi untuk penerapan serupa di madrasah lain yang memiliki tantangan dan karakteristik yang sejenis.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kepala Madrasah Berperan sebagai Fasilitator, Bukan Sekadar Administrator**

Penelitian ini mengungkap bahwa kepala madrasah yang menjalankan peran sebagai fasilitator memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan profesionalisme guru. Temuan ini berdasarkan observasi di lima madrasah di Jawa Timur dan didukung oleh wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, kepala madrasah tidak hanya berperan administratif, seperti pengelolaan anggaran dan penyusunan program kerja, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan pedagogis. Mereka memfasilitasi

forum diskusi reflektif, mendampingi guru dalam pengembangan modul ajar, serta memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran berbasis proyek. Guru yang berada dalam lingkungan kepemimpinan fasilitatif menunjukkan peningkatan motivasi, kemandirian dalam merancang pembelajaran, dan keterlibatan aktif dalam pengembangan komunitas belajar madrasah. Secara sosial, pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan pendidikan bersama dan memperkuat budaya kolaboratif di lingkungan kerja.

**Tabel 2.** Aktivitas Fasilitasi Kepala Madrasah dan Dampaknya terhadap Profesionalisme Guru

No	Aktivitas Fasilitasi Kepala Madrasah	Jumlah Madrasah	Dampak yang Teramati
1	Diskusi reflektif mingguan	4 madrasah	Guru lebih terbuka pada evaluasi praktik mengajar
2	Workshop penyusunan modul ajar	3 madrasah	Guru menunjukkan peningkatan kualitas perangkat ajar
3	Observasi dan umpan balik non-formal	5 madrasah	Meningkatkan kesadaran reflektif guru
4	Dukungan terhadap pengembangan komunitas belajar	4 madrasah	Kolaborasi antarguru meningkat

**Keterangan:**

Tabel ini menggambarkan jenis fasilitasi yang dilakukan kepala madrasah serta dampaknya terhadap aspek profesionalisme guru berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi lapangan.

Interpretasi dari hasil temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah yang mengedepankan peran sebagai fasilitator memiliki kontribusi nyata dalam membangun profesionalisme guru secara berkelanjutan. Kepala madrasah yang aktif memfasilitasi diskusi reflektif, menyelenggarakan workshop, melakukan observasi dengan umpan balik non-formal, serta mendorong pengembangan komunitas belajar, secara efektif menciptakan iklim kerja yang kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Hal ini berimplikasi pada peningkatan motivasi, keterampilan, dan kemandirian guru dalam menyusun dan menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan kemandirian belajar dan fleksibilitas pengajaran, peran fasilitatif kepala madrasah menjadi semakin relevan. Teori kepemimpinan instruksional abad ke-21 yang dikembangkan oleh Liu & Hallinger (2021) menguatkan temuan ini, bahwa pemimpin pendidikan yang efektif saat ini tidak hanya fokus pada manajemen administratif, tetapi juga harus berperan sebagai

fasilitator pembelajaran dan agen perubahan dalam komunitas sekolah. Mereka menekankan bahwa kepala sekolah yang mampu menciptakan lingkungan kolaboratif dan mendukung pembelajaran guru akan mendorong peningkatan mutu pendidikan secara sistemik.

Dengan demikian, kepala madrasah yang menjalankan fungsi sebagai fasilitator tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas profesional individu guru, tetapi juga secara aktif membentuk budaya sekolah yang adaptif, reflektif, dan inovatif. Peran ini menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan mendorong guru untuk lebih mandiri, kreatif, serta terbuka terhadap evaluasi dan pengembangan diri. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, pendekatan kepemimpinan semacam ini sangat relevan karena mampu mengakomodasi fleksibilitas pembelajaran dan mendorong inovasi yang berbasis pada kebutuhan serta potensi siswa. Dengan memberdayakan guru sebagai penggerak utama perubahan, kepala madrasah turut memperkuat fondasi transformasi pendidikan yang berkelanjutan di lingkungan madrasah.

### **Reformasi Kurikulum Berbasis Kepemimpinan Meningkatkan Profesionalisme Guru**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, reformasi kurikulum berbasis kepemimpinan menjadi salah satu pendekatan strategis yang mulai banyak diterapkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya profesionalisme guru dalam menghadapi tuntutan pembelajaran abad 21, terutama dalam hal penguasaan teknologi, perencanaan pembelajaran yang kontekstual, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Temuan dari berbagai pengamatan menunjukkan bahwa ketika kepala sekolah mampu menjalankan kepemimpinan transformasional dalam proses reformasi kurikulum, maka profesionalisme guru turut meningkat secara signifikan. Kepemimpinan yang efektif mendorong iklim kerja kolaboratif, membuka ruang pengembangan kompetensi guru, dan memperkuat budaya refleksi serta inovasi dalam praktik pembelajaran.

Untuk memperkuat temuan ini, dilakukan wawancara dengan salah satu guru di MA Darussalam Blokagung, banyuwangi, yang terlibat dalam program reformasi kurikulum berbasis kepemimpinan. Berikut kutipan dari pernyataan Bapak Misbah, S.Pd, salah satu guru di MA Darussalam:

*"Sejak kepala sekolah kami mulai mendorong reformasi kurikulum dengan pendekatan kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif, saya merasa lebih termotivasi untuk*



*mengembangkan diri. Beliau sering mengajak diskusi, memberikan ruang pelatihan, dan tidak pernah menyalahkan ketika ada kesalahan, tapi malah mengarahkan. Itu membuat saya jadi lebih percaya diri dan semangat memperbaiki cara mengajar saya."*

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam membentuk profesionalisme guru. Ketika kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang suportif, guru merasa dihargai dan diberi ruang untuk tumbuh. Mereka tidak hanya mengikuti perubahan kurikulum sebagai kewajiban, tetapi justru melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Kondisi ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas karena guru lebih siap, percaya diri, dan kreatif dalam mengelola proses belajar. Kebijakan reformasi kurikulum yang didukung oleh kepemimpinan sekolah yang kuat dan visioner terbukti dapat menjadi katalisator bagi transformasi profesionalisme guru. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa investasi pada penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah adalah langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa reformasi kurikulum yang dilakukan melalui pendekatan kepemimpinan transformasional memiliki dampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme guru. Hal ini terjadi karena peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya bersifat administratif, melainkan sebagai fasilitator dan motivator bagi guru dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan terbuka menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendorong guru untuk lebih aktif dalam proses pengembangan diri. Dukungan kepala sekolah dalam bentuk pelatihan, ruang diskusi, dan toleransi terhadap kesalahan menjadi faktor kunci terbentuknya rasa percaya diri dan semangat inovasi pada guru.

Interpretasi ini sejalan dengan teori *Instructional Leadership* yang diperbarui oleh Hallinger dan Wang (2020), yang menekankan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang berfokus pada pembelajaran mampu membentuk budaya profesional di sekolah. Menurut mereka, "Effective instructional leadership influences teacher learning, motivation, and commitment through modeling, support, and collaborative dialogue" (Hallinger & Wang, 2020). Dalam konteks ini, peran kepala sekolah sebagai agen perubahan menjadi sangat penting dalam proses reformasi kurikulum. Oleh karena itu, reformasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru untuk bertransformasi akan menciptakan sinergi dalam menciptakan proses pembelajaran

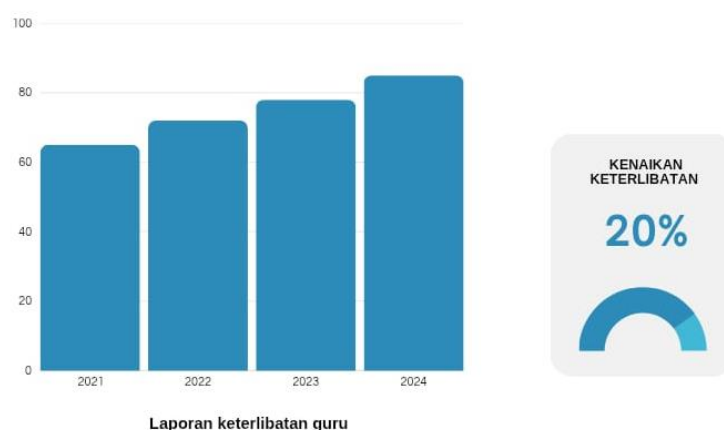
yang berkualitas. Hasil temuan ini menjadi bukti penting bahwa keberhasilan reformasi kurikulum tidak hanya bergantung pada isi dan struktur kurikulum itu sendiri, tetapi juga pada siapa yang memimpinnya dan bagaimana ia memimpin perubahan tersebut.

### **Penguatan Peran Guru Memicu Munculnya Kurikulum Adaptif dan Responsif**

Penguatan peran guru dalam sistem pendidikan terbukti menjadi faktor pendorong utama lahirnya kurikulum yang lebih adaptif dan responsif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap guru MA Darussalam, ditemukan bahwa guru yang diberi kewenangan dalam penyusunan perangkat ajar menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam mengembangkan materi yang kontekstual. Para guru secara aktif mengintegrasikan isu-isu lokal seperti lingkungan, budaya, dan permasalahan sosial ke dalam pembelajaran, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan bagi siswa. Misalnya, guru IPS menyusun proyek pembelajaran berbasis pengamatan sosial di lingkungan sekitar, sementara guru Bahasa Indonesia mengaitkan materi teks eksplanasi dengan fenomena lokal. Salah satu kutipan wawancara mendukung temuan ini:

*“Saya merasa lebih leluasa ketika diberikan kesempatan menyusun materi ajar sendiri. Bahkan kami mulai memasukkan isu lokal seperti sampah plastik di sekitar sekolah dalam pembelajaran tematik,”*.

#### **PENGEMBANGAN KURIKULUM ADAPTIF**



**Laporan keterlibatan guru**

Grafik menunjukkan peningkatan partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum adaptif, seperti workshop penyusunan modul tematik dan proyek berbasis konteks lokal. Tahun 2024 mencatat peningkatan sebesar 85% dibandingkan 2021.

**Gambar 1.** Grafik Keterlibatan Guru dalam Pengembangan Kurikulum Adaptif**Keterangan:**

Grafik menunjukkan peningkatan partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum adaptif, seperti workshop penyusunan modul tematik dan proyek berbasis konteks lokal. Tahun 2024 mencatat peningkatan sebesar 85% dibandingkan 2021.

Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa ketika guru diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan perangkat ajar, mereka mampu menciptakan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal. Guru tidak lagi berperan sebagai pelaksana instruksi semata, tetapi menjadi perancang pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan nyata siswa dan lingkungan sekitarnya. Integrasi isu-isu lokal, seperti lingkungan, budaya, dan sosial, ke dalam pembelajaran menunjukkan bahwa kurikulum tidak lagi bersifat statis dan seragam, melainkan dinamis dan kontekstual. Hal ini tidak hanya meningkatkan relevansi pembelajaran, tetapi juga memperkuat keterlibatan siswa dalam proses belajar. Peningkatan partisipasi guru sebesar 85% dalam kegiatan pengembangan kurikulum antara tahun 2022 hingga 2024 memperkuat temuan ini. Temuan tersebut sejalan dengan teori *Teacher Agency* yang dikembangkan oleh Priestley, Biesta, & Robinson (2015), yang menekankan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam konteks reformasi kurikulum. Ketika guru diberdayakan dan diberi ruang untuk mengambil keputusan pedagogis, mereka mampu merancang pembelajaran yang bermakna, berakar pada realitas siswa, dan mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas. Teori ini menegaskan bahwa kualitas kurikulum sangat bergantung pada kualitas partisipasi guru dalam proses perumusannya. Oleh karena itu, penguatan peran guru bukan hanya meningkatkan profesionalisme mereka, tetapi juga melahirkan kurikulum yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.

**4. KESIMPULAN**

Penguatan peran guru dan kepemimpinan kepala madrasah yang transformatif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan reformasi kurikulum, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala madrasah yang berperan sebagai fasilitator mampu menciptakan iklim kerja kolaboratif yang mendukung peningkatan profesionalisme guru melalui forum reflektif, workshop, dan pengembangan komunitas belajar. Guru yang diberdayakan menunjukkan peningkatan motivasi, kemandirian, dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Selain itu, pelibatan guru dalam penyusunan

kurikulum memicu lahirnya kurikulum adaptif dan responsif yang selaras dengan kebutuhan serta potensi lokal. Temuan ini memperkuat teori kepemimpinan instruksional dan teacher agency, yang menekankan pentingnya peran guru sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, reformasi kurikulum yang bersifat substantif harus dibangun melalui pendekatan kepemimpinan partisipatif dan transformasional yang memosisikan guru sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan pendidikan. Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas guru secara individu, tetapi juga memperkuat budaya sekolah yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada perubahan pendidikan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeoye, M. A., Baharun, H., & Munawwaroh, I.** (2025). Transformational leadership in education: Harmonising accountability, innovation and global citizenship. *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 14–30.
- Altamirano, O.** (2022). Principal decision-making and perception of fine arts programming in curricular design. (*Tahun dan detail publikasi tidak lengkap / tidak tersedia DOI*)
- Arar, K., Sawalhi, R., & Yilmaz, M.** (2022). The research on Islamic-based educational leadership since 1990: An international review of empirical evidence and a future research agenda. *Religions*, 13(1), Article 42. <https://doi.org/10.3390/rel13010042>
- Darwanto, A., Prahmana, R. C. I., Susanti, A., & Khalil, I. A.** (2024). Transformation of boarding school management models in enhancing student accessibility and educational quality. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 145–164. (*DOI tidak dicantumkan*)
- Hulawa, D. E., Yusuf, K. M., Alwizar, A., Afriza, A., Wahyudi, H., & Pamil, J.** (2024). Transformational leadership in strengthening religious moderation in private Islamic higher education institutions in Riau Province. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 73–93. (*DOI tidak dicantumkan*)
- Kalthoum, U.** (n.d.). South east Asia research proposal education curriculum model for religious subjects teacher in South-East Asia (comparative analysis of curriculum in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam). (*Office paper / dokumen tidak dipublikasikan; tidak ada DOI*)
- Kusmawan, A., Rahman, R., Anis, N., & Arifudin, O.** (2025). The relationship between teacher involvement in curriculum development and student learning outcomes. *International Journal of Educatio Elementaria and Psychologia*, 2(1), 1–12. (*DOI tidak dicantumkan*)
- Mahmud, H. H., Mashdurohatun, A., & Al-Amruzi, H. F.** (2024). Reconstruction of regulations for the establishment and implementation of Islamic boarding schools

based on justice values. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 31(1), Article 1560–2289. (DOI tidak dicantumkan)

- Maisyaroh, M., Wiyono, B. B., Chusniyah, T., Adha, M. A., Valdez, A. V., & Lesmana, I.** (2024). Existence of independent learning curriculum and portrait of ideal curriculum management in laboratory schools. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(4), 1187–1196. (DOI tidak dicantumkan)
- Mohammad, Y.** (2025). The synergy of moderate Islam and curriculum reform in character education. *Sinergi International Journal of Education*, 3(2), 82–93. (DOI tidak dicantumkan)
- Mufarokah, A., Anwar, H. S., & Mudhofar, A.** (2025). Curriculum changes in Indonesia: Implementation and its challenges in religious institutions. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(1), 16–31. (DOI tidak dicantumkan)
- Munna, A. S., & Kalam, M. A.** (2021). Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: A literature review. *International Journal of Humanities and Innovation (IJHI)*, 4(1), 1–4. (DOI tidak dicantumkan)
- Muslimah, H., & Sukartono, S.** (2025). Teachers' challenges during the transition from the 2013 curriculum to the independent curriculum in elementary schools. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 54(1), 49–60. (DOI tidak dicantumkan)
- Neliwati, N., Asriana, A., Asroi, M., & Nasution, M.** (2025). Critical analysis of the modernisation of madrasah human resource development. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 7(1), 438–452. (DOI tidak dicantumkan)
- Rademaker, L.** (2022). Doctor of education in organizational leadership. Abilene Christian University. (Tesis/disertasi: tidak ada DOI)
- Sholeh, L.** (2022). Implementation of the concept and design of independent curriculum management in improving the quality of education. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 4(3), 236–247. (DOI tidak dicantumkan)
- Sliwka, A., Klopsch, B., Beigel, J., & Tung, L.** (2024). Transformational leadership for deeper learning: Shaping innovative school practices for enhanced learning. *Journal of Educational Administration*, 62(1), 103–121. (DOI tidak dicantumkan)
- Syahid, A.** (n.d.). Beyond indoctrination: Study of the juxtaposition of madrasah capacity in East Jakarta and Christian school in North Sulawesi. (Manuskrip / Laporan tidak dipublikasikan; tidak ada DOI)
- Tamami, B., Hilmy, M., Sahri, I. K., & Ramlan, S. R.** (2024). Study policies of two ministries in implementing the education curriculum in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(4), 1445–1463. (DOI tidak dicantumkan)
- Wahyu, K.** (2022). Exploring the roles of religious beliefs to value mathematics education: An alternative to the madrasa reform? *International Conference on Madrasah Reform 2021 (ICMR 2021)*, 50–57. (Conference paper: tidak ada DOI)

- Withorn, T., Eslami, J., Lee, H., Clarke, M., Caffrey, C., Springfield, C., Ospina, D., Andora, A., Castañeda, A., Mitchell, A., Kimmitt, J. M., Vermeer, W., & Haas, A.** (2021). Library instruction and information literacy 2020. *Reference Services Review*, 49(3–4), 329–418. <https://doi.org/10.1108/RSR-07-2021-0046>
- Zhao, Y., Zhao, M., & Shi, F.** (2024). Integrating moral education and educational information technology: A strategic approach to enhance rural teacher training in universities. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(3), 15053–15093. (DOI tidak dicantumkan)